

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KOTA CIREBON TAHUN 2024



JL. BRIGJEND DHARSONO NO. 4 BY PASS CIREBON
TLP. 0231-486867

KATA PENGANTAR

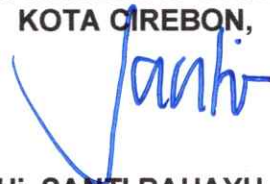
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan rahmatnya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan dan pembuatan rancangan awal RENJA Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Cirebon.

Rancangan awal RENJA Tahun 2024 merupakan rencana kerja Dinas Sosial Kota Cirebon pada tahun 2024 untuk pencapaian target yang optimal dalam kurun waktu 1 tahun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan dan pembuatan rancangan awal RENJA Tahun 2024 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan penyusunan dan pembuatan rancangan awal RENJA Tahun 2024 yang akan datang.

Demikian semoga penyusunan dan pembuatan rancangan awal RENJA Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Cirebon ini dapat bermanfaat.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIREBON,**



Dra. Hj. SANTI RAHAYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660601 198901 2 003

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-5
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 Tahun Berjalan.....	II-1
 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial.....	III-1
3.2. Program dan Kegiatan.....	III-5
 BAB IV PENUTUP	IV-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya meliputi Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sebagai dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah.

Rancangan Perubahan Renja memuat evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, Rencana Program dan Kegiatan dalam Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan awal RENJA ini merupakan sub sistem penting sebagai input dalam penyusunan program dan penganggaran SKPD. Hal ini karena fungsi RENJA sebagai landasan untuk menyusun Rancangan RPD.

1.1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon, telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 89 Tahun 2021, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial adalah sebagai berikut :

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon, telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 89 Tahun 2021, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial adalah sebagai berikut :

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala daerah di Bidang Sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Cirebon mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala daerah bidang sosial;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala daerah bidang sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala daerah bidang sosial;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan wali kota terkait dengan tugas dan fungsi.

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;

- b. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi adalah Sekretaris;
- c. Pembantu Sekretaris sebagai pembantu unsur staf atau administrasi adalah Kepala Sub Bagian;
- d. Pembantu Pimpinan sebagai unsur pelaksana adalah Kepala Bidang;
- e. Pembantu Kepala Bidang sebagai pembantu unsur pelaksana adalah Kepala Seksi;
- f. Pembantu Pimpinan sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu adalah Kepala UPTD;
- g. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi pada UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- h. Pelaksana teknis operasional dan / atau administrasi adalah Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai Non Struktural

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Cirebon terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Koordinator Program dan Keuangan;
- 2. Bidang Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Sosial;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 3. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar;
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Penanganan Bencana.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - a. UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
 - b. UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan; dan



c. UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi

Unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi adalah Sekretaris;
- c. Pembantu Sekretaris sebagai pembantu unsur staf atau administrasi adalah Kepala Sub Bagian;
- d. Pembantu Pimpinan sebagai unsur pelaksana adalah Kepala Bidang;
- e. Pembantu Kepala Bidang sebagai pembantu unsur pelaksana adalah Kepala Seksi;
- f. Pembantu Pimpinan sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu adalah Kepala UPTD;
- g. Pembantu pimpinan sebagai unsur staf atau administrasi pada UPTD adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- h. Pelaksana teknis operasional dan / atau administrasi adalah Kelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai Non Struktural

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Cirebon terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Koordinator Program dan Keuangan;
3. Bidang Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Sosial;
 - b. Sub Koordinator Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial; dan

- c. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Dasar;
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Penanganan Bencana.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:
 - a. UPT Lingkungan Pondok Sosial, Panti Persinggahan dan Loka Bina Karya;
 - b. UPT Taman Makam Pahlawan dan Nilai-nilai Kepahlawanan; dan
 - c. UPT Rumah Perlindungan Sosial Anak.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Renja Dinas Sosial Kota Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;



- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018-2023; berikut perubahan-perubahannya;
- l. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025;
- o. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Cirebon, telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 89 Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial Kota Cirebon adalah menyiapkan program dan kegiatan kegiatan dalam upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kota Cirebon melalui intervensi berbagai program pembangunan serta penataan sistem pengelolaan pembangunan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Serta akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategik dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024.



Penetapan di muka rencana kinerja kegiatan dan sasaran akan memberi daya dorong sekaligus sebagai komitmen merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Cirebon dan akan dilaporkan penggunaannya lewat Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir Tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen rancangan awal Renja Dinas Sosial Kota Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Bab III Rencana Program Dan Kegiatan Dalam RENJA Perangkat Daerah

- III.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial
- III.2. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KOTA CIREBON SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Cirebon Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Capaian kinerja yang dibahas adalah pencapaian kinerja tiap program kegiatan pada Dinas Sosial Kota Cirebon dalam kurun waktu tahun 2022 dan tahun 2023 sampai dengan triwulan II (bulan Maret 2023) dan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Sosial Kota Cirebon. Ada Enam program capaian kinerja yang tertuang dalam program pokok Dinas Sosial Kota Cirebon, berikut adalah penjelasan rincian 6 (Enam) program dimaksud :

1. Program Pemberdayaan Sosial

a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100% dengan target 132 Orang Karang Taruna dan 66 Orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 100% dimana waktu pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pemantapan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) kepada 100 orang.

2. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan alat bantu bagi penyandang disabilitas kepada 40 orang

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 6,37% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemberian Permakanan bagi penyandang disabilitas kepada 60 orang, sedang dilaksanakan pada triwulan III sampai Triwulan IV.

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan alat bantu bagi penyandang disabilitas kepada 36 orang.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan alat bantu bagi penyandang disabilitas kepada 40 Orang, dilaksanakan pada Triwulan IV.

➤ Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirit dan Sosial

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spirit dan sosial kepada 25 Orang, dilaksanakan pada Triwulan IV.

➤ Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga kepada 15 orang

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga kepada 15 orang, sedang dilaksanakan pada triwulan I sampai Triwulan IV.

b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

➤ Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan fasilitasi CPCL Rumah Ambruk target 100 rumah, sampai dengan bulan Desember masih berjalan monitoring dan evaluasi rumah ambruk berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Sosial Kota Cirebon.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan fasilitasi CPCL Rumah Ambruk target 100 rumah, sedang dilaksanakan pada Triwulan II sampai dengan Triwulan IV.

➤ Penyediaan Permakanan

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan paket permakanan untuk lansia terlantar bagi 342 orang.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan paket

permakanaan untuk lansia terlantar bagi 100 orang, sedang dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirit dan Sosial

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 3,82% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spirit dan Sosial dengan target 100 Orang yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- a. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan jaminan sosial bagi anak-anak terlantar bagi 246 orang.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 3,98% dimana waktu pelaksanaan kegiatan jaminan sosial bagi anak-anak terlantar bagi 100 orang, sedang dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

- b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan updating dokumen data keluarga miskin dan PMKS yang divalidasi dengan target 1 dokumen sedang berjalan sampai dengan bulan Desember 2022.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan updating dokumen data keluarga miskin dan PMKS yang divalidasi

dengan target 39,540 Keluarga sedang berjalan sampai dengan bulan Desember 2023.

➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target pelaksanaan Laporan Pembinaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 1 dok, Pelatihan Kewirausahaan bagi keluarga penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) 50 orang, terfasilitasinya data sasaran keluarga penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan bantuan sosial 1 dok, terpenuhinya biaya operasional kelembagaan PKH 6 sekretariat, tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan PKH 1 dok, tersedianya laporan rapat koordinasi PKH Kota Cirebon, terlaksananya sinergitas PPKH Kota 1 dok.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan target 64.364 Keluarga yang akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target Dokumen data CPCL kelompok usaha bersama (KUBE) untuk pengembangan usaha ekonomi, tidak dilaksanakan dikarenakan refocusing anggaran.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan target Dokumen data CPCL kelompok usaha bersama (KUBE) untuk pengembangan usaha ekonomi, yang akan dilaksanakan pada Triuwlan IV.

4. Program Penanganan Bencana

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dengan target penyediaan alat-alat/ prasarana penanggulangan bencana dan bufferstock berupa permakanan.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,64% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dengan target penyediaan alat-alat/ prasarana penanggulangan bencana dan bufferstock berupa permakanan dengan target 554 Orang, sedang berjalan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

➤ Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional dengan target 2 Komponen Komplek Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional dengan kegiatan Pembuatan Makam Pahlawan Tua dan Rehabilitasi Makam Pahlawan, sedang berjalan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan kegiatan Dokumentasi TMP dan Makam Pahlawan melalui data digital, Tersalurkanya Bansos/Sembako ke Anggota LVRI Kota Cirebon dengan target 70 Orang Veteran Pahlawan.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional dengan target 560 Makam, sedang berjalan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

➤ Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 14,57% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan target 12 Laporan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

➤ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan kegiatan Dokumen Program Kerja, Dokumen Renja, Dokumen Renja Perubahan, Dokumen Renstra, Dokumen Renstra Perubahan, dan RKT.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 5 Dokumen yang akan dilaksanakan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan kegiatan Dokumen RKA.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan kegiatan Dokumen RKA, yang akan dilaksanakan pada Triwulan II.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan kegiatan Dokumen RKA Perubahan.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan

Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan kegiatan Dokumen RKA Perubahan, yang akan dilaksanakan pada Triwulan II.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan kegiatan Dokumen DPA.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan kegiatan Dokumen DPA, yang akan dilaksanakan pada Triwulan III.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan kegiatan Dokumen DPA Perubahan.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan kegiatan Dokumen DPA Perubahan, yang akan dilaksanakan pada Triwulan III.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III dan IV.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan kegiatan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I, II, III dan IV, sedang dilaksanakan pada Triwulan I sampai Triwulan IV.

➤ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah, Dokumen LAKIP, Dokumen LKPJ, Dokumen LPPD, Dokumen TEPRA, Laporan Penatusahaan Barang dan Inventaris, Laporan Tahunan, SPM.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 9,77% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 12 Laporan, sedang dilaksanakan pada Triwulan I sampai Triwulan III.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan kegiatan Leger Gaji dan Daftar Tunjangan ASN.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 18,16% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan kegiatan Leger Gaji dan Daftar Tunjangan ASN.

➤ Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan kegiatan SPJ Kegiatan, SPM Gaji dan Tunjangan dan SPM Kegiatan.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan kegiatan SPJ Kegiatan, SPM Gaji dan Tunjangan dan SPM Kegiatan, yang sudah dilaksanakan pada Triwulan I.

➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan kegiatan Laporan Keuangan Unaudit dan Laporan Keuangan Audited.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 63,08% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan kegiatan Laporan Keuangan Unaudit dan Laporan Keuangan Audited, sedang dilaksanakan dari Triwulan I sampai Triwulan II.

➤ Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan kegiatan Bahan Data Pemeriksaan dan Dokumen NHP.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan

Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan kegiatan Bahan Data Pemeriksaan dan Dokumen NHP, kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan II.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan kegiatan Laporan Bulanan dan Laporan Semesteran.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan kegiatan Laporan Bulanan dan Laporan Semesteran, kegiatan sedang dilaksanakan dari Triwulan I sampai Triwulan IV.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan kegiatan Polis Asuransi Kendaraan Roda Empat (R4).

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 73,96% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan kegiatan Polis Asuransi Kendaraan Roda Empat (R4), kegiatan ini sudah dilaksanakan pada Triwulan I.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dengan kegiatan pengadaan Pakaian PDH, Korpri, Batik dan Olah Raga, kegiatan ini sedang dilaksanakan pada Triwulan I.

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan kegiatan Alat Tulis Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Tinta Refill.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan kegiatan Alat Tulis Kantor dan Tinta Refill, kegiatan ini sedang dilaksanakan pada Triwulan I.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan kegiatan Peralatan Rumah Tangga.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan kegiatan Peralatan Rumah Tangga, kegiatan ini sedang dilaksanakan pada Triwulan I.



➤ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan kegiatan Isi Ulang Tabung Gas Elpiji 12 Kg.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 23,13% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan kegiatan Isi Ulang Tabung Gas Elpiji 12 Kg, kegiatan ini sedang dilaksanakan pada Triwulan I.

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan kegiatan Cetak dan Penggandaan Dokumen.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan kegiatan Cetak dan Penggandaan Dokumen, kegiatan ini sedang dilaksanakan pada Triwulan I.

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan kegiatan Buku Profil Dinas Sosial, Jasa Publikasi, Surat Kabar Harian Lokal, Surat Kabar Harian Nasional, Surat Harian Regional.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 17,94% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan

kegiatan Buku Profil Dinas Sosial, Jasa Publikasi, Surat Kabar Harian Lokal, Surat Kabar Harian Nasional, Surat Harian Regional, kegiatan ini sedang dilaksanakan pada Triwulan I sampai Triwulan IV.

➤ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan kegiatan Laporan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Laporan Makanan dan Minuman Hari-hari Besar, Laporan/Notulensi Rapat Internal/Briefing, Laporan Penerimaan/Kunjungan Tamu bagi Dinas Sosial, Laporan Perjalanan Dinas.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 3,28% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan kegiatan Laporan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Laporan Makanan dan Minuman Hari-hari Besar, Laporan/Notulensi Rapat Internal/Briefing, Laporan Penerimaan/Kunjungan Tamu bagi Dinas Sosial, Laporan Perjalanan Dinas, kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan III

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

➤ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan kegiatan tersedianya kendaraan operasional Pejabat Eselon II, kegiatan ini sudah dilaksanakan pada Triwulan I.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan kegiatan tersedianya kendaraan operasional Pejabat Eselon II, kegiatan ini difokuskan.

➤ Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mebel dengan kegiatan Mebeuler yang tersedia.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mebel dengan kegiatan Mebeuler yang tersedia, kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I.

➤ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 90,75% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

➤ Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan kegiatan Materai 10000.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 17,50% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan kegiatan Materai 10000, kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I.

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan kegiatan Struk Pembayaran Tagihan Rekening Air (PDAM), Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Struk Pembayaran Tagihan Rekening Telepon.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 18,22% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan kegiatan Struk Pembayaran Tagihan Rekening Air (PDAM), Struk Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Struk Pembayaran Tagihan Rekening Telepon, yang dilaksanakan pada Triwulan I sampai Triwulan IV.

➤ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kegiatan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebersihan,

Seragam Petugas Kebersihan Kantor dan Tenaga Kebersihan Kantor.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 4,20% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan kegiatan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kebersihan, Seragam Petugas Kebersihan Kantor dan Tenaga Kebersihan Kantor, kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I sampai Triwulan III.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan kegiatan Bahan Bakar: R-2, R-3, R-4 (14 Unit, 1 Unit, 7 Unit), Pelumas: R-2, R-3, R-4, R-6 (18 Unit, 1 Unit, 7 Unit), Servis: R-2, R-3, R-4 (14 Unit, 1 Unit, 7 Unit), Suku Cadang: R-2, R-3, R-4 (14 Unit, 1 Unit, 7 Unit), STNK/SKPD PKB R2, SKPD PKB R3, SKPD PKB R4, SKPD PKB R6.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 7,46% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target 21 Unit, kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan III.

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dengan kegiatan Gedung yang direhab, Parkiran kendaraan Bermotor dan Ruang Kerja yang direhab.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 0,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan dengan kegiatan Gedung yang direhab, Parkiran kendaraan Bermotor dan Ruang Kerja yang direhab, yang sedang dilaksanakan pada Triwulan I.

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan kegiatan Peralatan kerja yang diperbaiki.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 62,22% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan kegiatan Peralatan kerja yang diperbaiki, kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I dan Triwulan III.

➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator output sampai dengan bulan Desember 2022 tercapai 100,00% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan kegiatan Peralatan berkala perlengkapan Kantor.

Indikator output sampai dengan bulan Maret 2023 tercapai 6,69% dimana waktu pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan kegiatan Peralatan berkala perlengkapan Kantor, yang sedang dilaksanakan pada Triwulan I.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Cirebon

Sesuai Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial Kota Cirebon merupakan urusan wajib dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan lain yang terkait langsung dengan Standar Pelayanan Minimal adalah PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Cirebon telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2013 tentang Setandar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kota Cirebon.

Batas waktu pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kota Cirebon untuk mencapai target jenis pelayanan sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pedoman SPM Bidang Sosial di Kota Cirebon disebutkan Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu, meliputi :

1. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Skala Kota;
2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kota;
3. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota;
4. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kota;
5. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kota;
6. Evaluasi korban bencana skala kota.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Cirebon

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang, suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang, Isu-isu strategis yang dihadapi yang merupakan tantangan kedepan oleh Pemerintah Daerah, perlu kerjasama dan pemecahan masalah secara bersama dengan pihak terkait dalam hal ini isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kota Cirebon adalah :

1. Peningkatan program perlindungan sosial, jaminan sosial dan rehabilitasi soaial bagi masyarakat miskin;
2. Peningkatan penanganan PPKS;



BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANCANGAN AWAL RENJA SKPD

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Cirebon

A. Tujuan

Adapun bentuk tujuan yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial dan Jangkauan Pelayanan Sosial;
- c. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah;

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun bentuk sasaran yang akan dicapai, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah;
- b. Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemerlu Kesejahteraan Sosial dan Jangkauan Pelayanan Sosial;
- c. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Politik Daerah.

3.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Cirebon Tahun 2024, dan penjelasan perubahan anggaran untuk lebih lengkapnya tersaji dalam tabel terlampir, adalah :

1. Program Pemberdayaan Sosial

- a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- b. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- Sub Kegiatan Pemberian Bibingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- a. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. Program Penanganan Bencana

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



BAB IV

PENUTUP

Memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Kepala Perangkat Daerah menyampaikan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kota Cirebon sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD).

Rancangan awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2024 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan acuan, baik bagi Rencana Anggaran dan Kegiatan bagi Perangkat Daerah guna mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditentukan sesuai dengan visi dan misi Dinas Sosial Kota Cirebon.

Dengan menggunakan Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2024 sebagai acuan pembuatan Perubahan RKA – Perangkat Daerah dan Perubahan RAPBD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan secara sinergis untuk mendukung Visi Kota Cirebon yang lebih baik sebagai Kota jasa dan perdagangan yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) yang dititik beratkan pada 1 (satu) urusan yaitu: Urusan Sosial

Selanjutnya, dalam hal terdapat perbedaan substansi antara Renja Dinas Sosial Kota Cirebon dengan dokumen anggaran Dinas Sosial Kota Cirebon yang telah disahkan (DPA), maka dokumen anggaran yang telah disahkan tersebut digunakan sebagai rancangan awal RENJA Dinas Sosial Kota Cirebon.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA CIREBON,**

Dra. Hj. SANTI RAHAYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660601 198901 2 003

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS SOSIAL KOTA CIREBON
TAHUN 2024**

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	11.087.895,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		11.642.290,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	11.087.895,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		11.642.290,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.099.950,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		10.604.948,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	89.155.389,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		93.613.158,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			5 Dokumen	4.946.793.767,00					Dinas Sosial Kota Cirebon	-	5.625.681.553,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4.897.350.479,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		5.573.766.102,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	12.572.669,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		13.201.302,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	9.710.006,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		10.195.506,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	10.288.688,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		10.803.122,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	16.871.925,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		17.715.521,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	44.889.500,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon	-	47.133.975.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	39.889.500,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		41.883.975.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	5.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		5.250.000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	-			32 Orang	151.883.350,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon	-	90.177.518.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan					4 Paket	78.883.350,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		82.827.518.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				32 Orang	73.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		7.350.000.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			6 Paket	763.679.456,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon	-	878.041.371.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	62.258.585,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		65.371.514.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7.726.688,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		8.113.022.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.057.200,00	Kota Cirebon, Kesambi, Sunyaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		4.260.060,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	49.913.483,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		52.409.157.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	109.723.500,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		146.709.675.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	530.000.000,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		601.177.943.00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			3 Jenis	375.682.506,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon	-	2.292.383.244,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		561.344.380,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Cirebon, Semua kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		1.207.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	101.682.506,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		148.766.631,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	75.000.000,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		157.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	199.000.000,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		217.272.233,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Jenis	688.656.360,00				Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningk atan Profes ionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon	-	757.769.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharai dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	35.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		52.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharai/Direhabilitasi				3 Unit	195.348.854,00	Kota Cirebon, Kesambi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		205.116.297,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharai/Direhabilitasi				40 Unit	32.550.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		34.177.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharai/Direhabilitasi				30 Unit	32.274.100,00	Kota Cirebon, Kesambi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah 6. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi.	Dinas Sosial Kota Cirebon		0,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pembinaan PSKS Individu dan Kelembagaan	58,81 Persen			58,81 Persen	350.000.000,00						58,81 Persen	250.949.500,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Sosialisasi pemberian Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-			1 Dokumen	50.000.000,00			-	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 5. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Prioritas.	Masyarakat Kota Cirebon	-	52.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial/ kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan MAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	10.000.000,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Sistem Perl indungan Sosial 1. Peningg ulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Cirebon		0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25.000.000,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Perl indungan Sosial 1. Peningg ulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Cirebon		95.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25.000.000,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Perl indungan Sosial 1. Peningg ulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Cirebon		55.125.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan														
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	60.000.000,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Sistem Perl indungan Sosial 1. Peningg ulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Cirebon		0,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	83,19 Persen			83,19 Persen	854.508.500,00						83,19 Persen	786.911.400,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Laporan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-			1 Dokumen	325.317.000,00			-	Reformasi Sistem Perl indungan Sosial 1. Peningg ulangan kemiskinan	-	-	303.187.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	325.317.000,00	Kota Cirebon, Kesanbi, Suntaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Perl indungan Sosial 1. Peningg ulangan kemiskinan	-		303.187.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				5 Makam	25.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Cirebon		110.248.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	21.000.000,00	Kota Cirebon, Kesambi, Suryaragi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Cirebon		52.500.000,00	DINAS SOSIAL
	J U M L A H															
							10.649.705.895,00								13.630.181.674,00	